



#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society

BAGAIMANA SIH PERATURAN KEKERASAN SEKSUAL SEBELUM ADANYA UU TPKS?

Sebelum UU TPKS, masih ada kekurangan dari peraturan perundang – undangan yang telah terbit sebelumnya misalnya pengaturan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual yang masih terbatas dan bahkan masih dipandang sebagai kejahatan kesusilaan, padahal kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap integritas tubuh.





#LihatData

by IJRS
Indonesia Judicial Research Society



Akan tetapi, sebelum UU TPKS juga **sudah ada peraturan-peraturan yang cukup progresif** khususnya dalam hal penanganan perkara pidana yang memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak, mulai dari pendampingan hingga pemberian restitusi.

Berikut adalah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga UU TPKS hadir.



- 📄 **Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).**
- 📄 KUHP masih mengatur KS, khususnya perkosaan secara sempit dan tidak diatur secara gender-neutral, padahal perkosaan juga bisa menimpa laki-laki.

- 📄 **Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahannya.**
- 📄 UU ini mengatur tindak pidana bernuansa kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif, serta memperkenalkan konsep restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

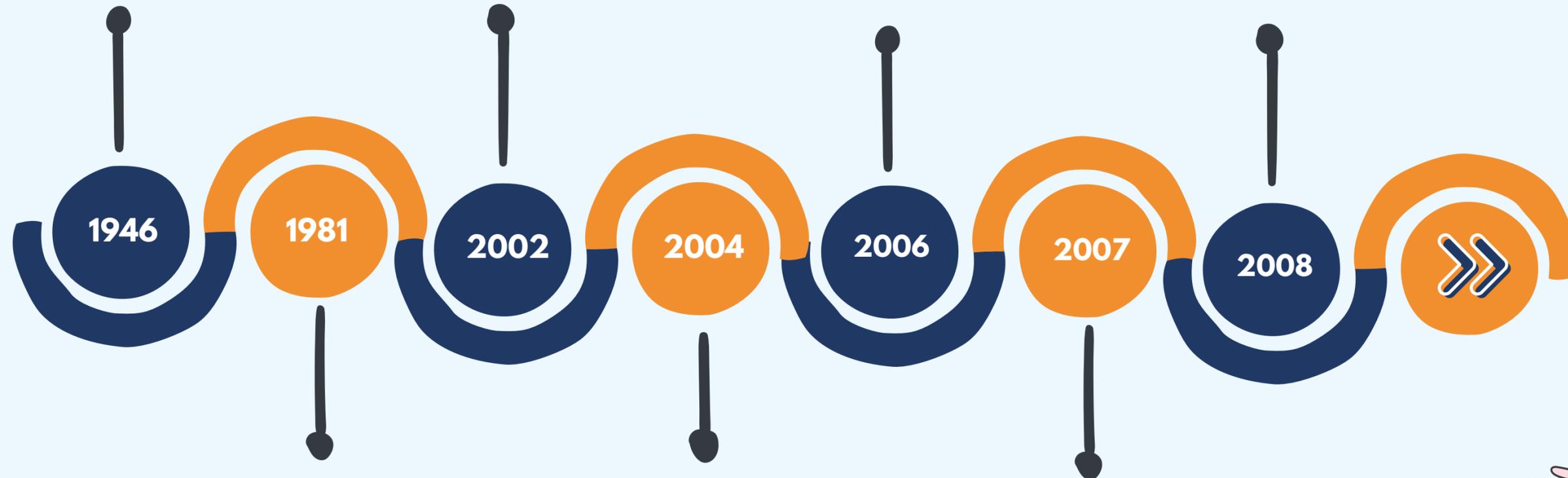
- 📄 **UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**
- 📄 UU ini telah memuat ketentuan umum dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban.

- 📄 **Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya.**
Unsur "kesusilaan" sama sekali tidak didefinisikan oleh UU ITE 2008 dan juga tidak direvisi lewat UU ITE 2019, sehingga rentan menjerat korban KBGS yang konten intimnya disebarluaskan tanpa persetujuan mereka (revenge porn).
- 📄 **Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.**
UU ini masih mengesampingkan interseksionalitas dalam perkara kekerasan seksual berbasis diskriminasi ras dan etnis.
- 📄 **Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**
Serupa dengan UU ITE, UU Pornografi juga berpotensi menjerat korban KBGS yang merupakan objek/model dalam konten intim yang tersebar.



#LihatData

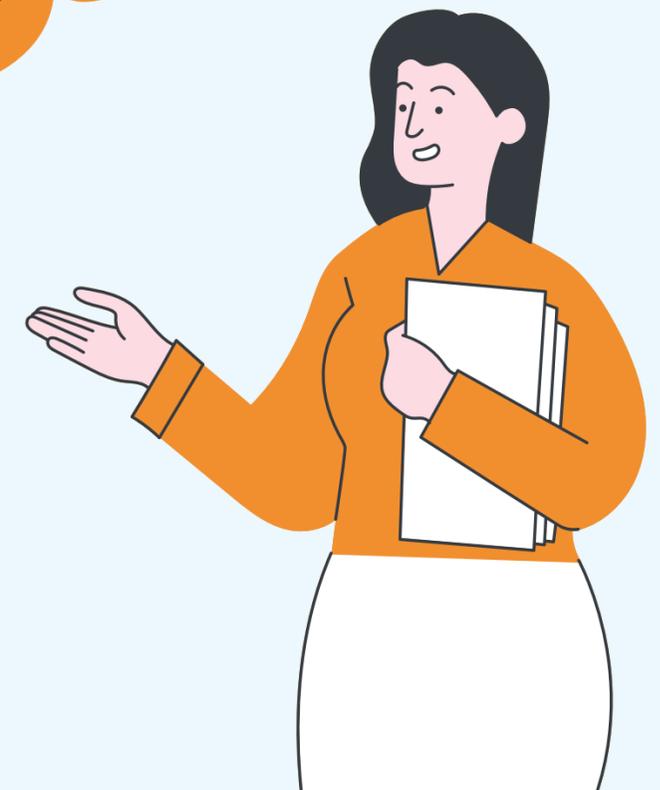
by IJRS
Indonesia Judicial Research Society



- 📄 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).**
- 📄 KUHP masih berorientasi terhadap pelaku, sehingga hak-hak bagi korban terbengkalai.

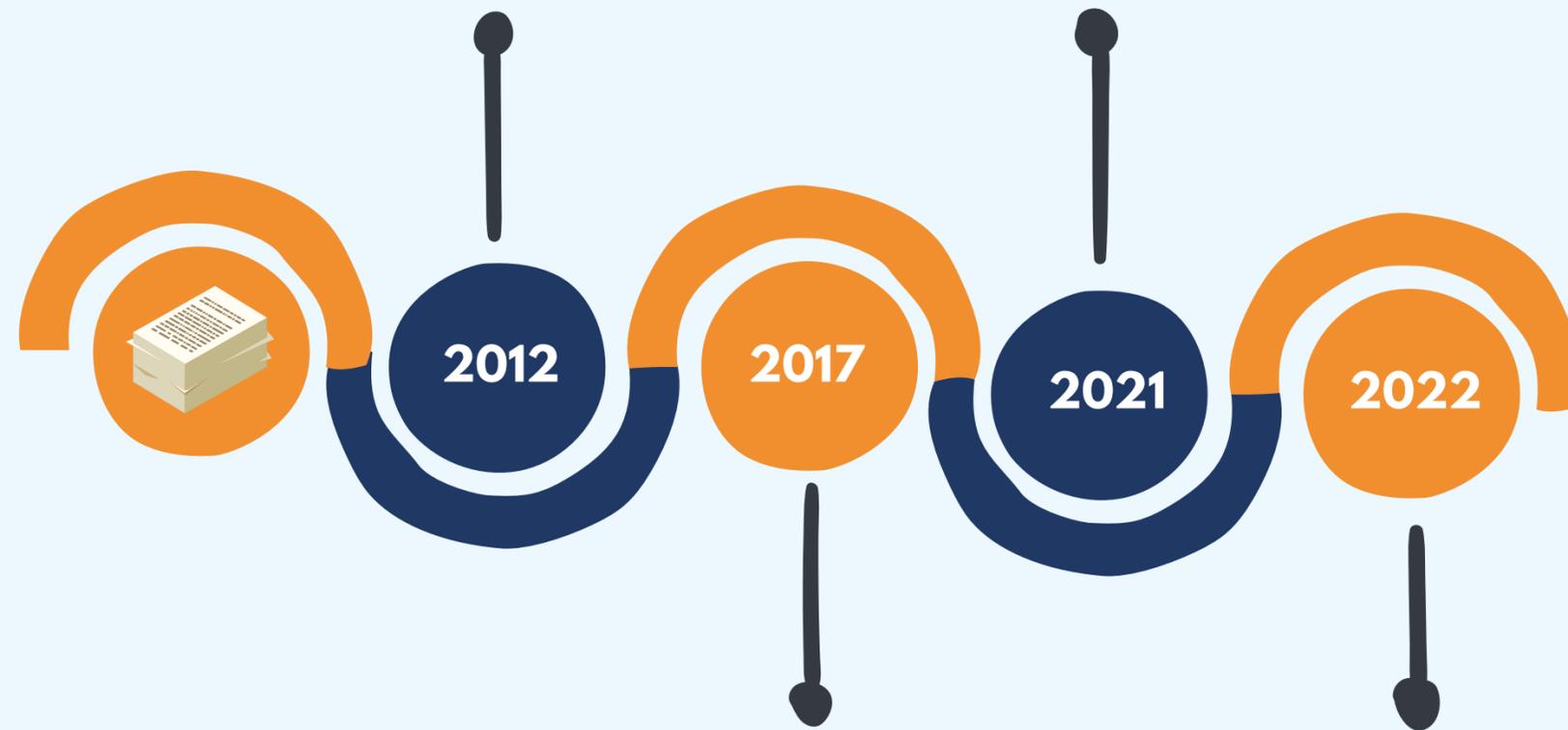
- 📄 **Undang-Undang No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**
- 📄 UU ini mengatur kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, serta juga memperkenalkan konsep perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban KDRT.

- 📄 **Undang-Undang No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
- 📄 UU ini telah mencakup pengaturan eksploitasi seksual dengan tujuan komersil, serta mengatur restitusi sebagai hak bagi korban perdagangan orang.



- 📄 **Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**
- 📄 UU ini mengatur terkait perlindungan anak yang menjadi korban atau saksi, misalnya terkait identitas anak yang menjadi korban atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan ataupun elektronik.

- 📄 **Pedoman Kejaksaan RI No. 1/2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.**
- 📄 Peraturan ini mengatur prosedur penanganan perkara perempuan dan anak yang harus ditaati oleh semua Jaksa, misalnya sikap Jaksa yang harus menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak seksis.



- 📄 **Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**
- 📄 Peraturan ini mengatur terkait pemeriksaan perkara dan sikap Hakim yang harus mengedepankan kesetaraan gender dan non-diskriminasi baik kepada perempuan dan anak sebagai korban, saksi, dan pelaku.

- 📄 **UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**
- 📄 UU TPKS hadir untuk menguatkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dan memuat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah terbit sebelumnya.



#LihatData

by  **IJRS**
Indonesia Judicial Research Society

